

**KEWENANGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH)
KABUPATEN PASURUAN MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

Ilmu Syariah	
PERTANYAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K- S-2011 017 SJ	No. REG : S-2011/SJ/017
	ASAL BUKU :
	TANGGAL : Oleh

**UNTUNG RIWAYADI
NIM: C03207039**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasaah Jinayah**

**SURABAYA
2011**

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Untung Riwayadi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Nurlailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

R.A. Vidia Gati, SE, Ak. MEI
NIP. 197605102007012030

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing

Drs. Jeje Abdul Rojaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 197106052008011026

Nurlailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Surabaya, 18 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian sebagai berikut: Pertama, bagaimana kewenangan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UU Nomor 32 tahun 2009? Kedua, bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UU Nomor 32 tahun 2009?

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data penelitian ini diperoleh dan dihimpun melalui wawancara, pembacaan dan kajian kepustakaan teks (*text reading*) dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini Diketahui bahwa Kewenangan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan sudah sesuai dengan yang di amanatkan dalam Pasal 63 Ayat 3 UU No. 32 Tahun 2009. Badan ini berwenang untuk membantu kepala daerah dalam bidang lingkungan. Di antaranya adalah menentukan kebijakan tingkat kabupaten/kota dalam hal memberikan izin lingkungan, penegakan hukum lingkungan hidup, memfasilitasi penyelesaian sengketa, mengelola informasi lingkungan hidup, pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Di dalam Islam terdapat sebuah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang khusus mengajak kepada ummat melakukan *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar* bernama *Wilāyatul al-Ḥisbah*. Lembaga ini secara khusus melakukan tugasnya dengan perangkat hukum (seperti Undang-Undang) maupun secara gradual melalui seruan-seruan moral agar umat konsisten dalam beragama dan melakukan *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar*. Secara substansional Kewenangan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam melaksanakan tugasnya memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh *Wilayah al-Ḥisbah* yaitu pengawasan. Hanya saja, karena Indonesia bukan merupakan negara Islam, maka ada beberapa ciri khas yang membedakan wewenang Badan Lingkungan Hidup (BLH) dengan wewenang *Wilayah al-Ḥisbah*.

Setelah melihat kesimpulan di atas maka penulis menyarankan agar Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan tetap fokus terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena dewasa ini problem-problem yang terjadi mengenai lingkungan hidup yang dapat membahayakan masyarakat luas semakin kompleks. Bagi masyarakat agar berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, karena setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
MOTTO.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Batasan Masalah.....	15
D. Rumusan Masalah.....	16
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Tujuan Penelitian.....	18
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	18
H. Definisi Operasional.....	19
I. Metode Penelitian.....	20

J. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II LEMBAGA PENGAWASAN DALAM KETATANEGARAAN ISLAM (WILĀYAH AL-ḤISBAH).....	25
A. Sekilas Tentang Wilāyah Al-Ḥisbah.....	25
1. Pengertian Wilāyah Al-Ḥisbah.....	25
2. Dasar Hukum Wilāyah Al-Ḥisbah.....	29
3. Pembentukan dan Perkembangan Wilāyah Al-Ḥisbah.....	30
B. Tugas dan Wewenang Wilāyah Al-Ḥisbah.....	34
1. Menyuruh Kepada Kebaikan.....	34
2. Melarang Dari Kemungkaran.....	37
C. Perundang-Undangan Tentang Lingkungan Hidup di Indonesia...	40
1. Perundang-Undangan.....	40
2. Kelembagaan	44
BAB III KEWENANGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) KAB. PASURUAN TENTANG LINGKUNGAN HIDUP.....	49
A. Sekilas Tentang Badan Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan.....	49
1. Latar Belakang Pembentukan Badan Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan.....	49
2. Potensi Sumber Daya Manusia.....	50
3. Isu-Isu Strategis.....	51
B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab. Pasuruan.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau trans-lokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.¹

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. Dari lingkungan hidup manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. Manusia memperoleh

¹ Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), 1

kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan.

Mencermati secara seksama mengenai lingkungan hidup yang mencakup semua makhluk Tuhan Yang Maha Esa, baik yang bernyawa dan tidak bernyawa, besar dan kecil, bergerak dan tidak bergerak, maka dapatlah dikatakan bahwa lingkungan merupakan sumber daya, karena sesuai dengan karakter dan sifatnya yang sangat kompleks tersebut dan memenuhi semua unsur yang terdapat dalam isi alam ini.²

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dari uraian di atas, dapat kita artikan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.³

Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah

² Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 4

³ Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, 4

Oleh karena itu, persoalan-persoalan lingkungan ini, seperti pencemaran, kerusakan, sumber daya alam, penyusutan cadangan hutan, musnahnya berbagai spesies hayati, erosi, banjir, bahkan jenis-jenis penyakit yang berkembang terakhir ini, diyakini merupakan gejala-gejala negatif yang secara dominan bersumber dari faktor manusia itu sendiri. Jadi, beralasan jika dikatakan di mana ada masalah lingkungan maka di situ ada manusia.⁴

Selain kerusakan di darat dan di laut, juga terjadi kerusakan di udara. Kerusakan di udara sebetulnya akibat dari kerusakan di bumi, seperti terjadinya kabut yang disebabkan oleh pembakaran hutan, pemakaian bahan bakar fosil

[illegible]

seperti minyak disel, bensin bertimbal dan lain-lain yang berakibat mengganggu pernafasan dan pandangan.⁵

Kasus-kasus di atas akibat dari pembangunan industri yang tidak dibarengi dengan baik fungsi pemerintah sebagai pelindung dan pengelolaan lingkungan hidup. Padahal pemerintah melalui Undang-undang mempunyai wewenang dalam masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ini dalam pelaksanaannya didukung dengan Undang-undang Nomor

⁹ “Dua perusahaan di Pasuruan dipidanakan”, Dalam <http://www.harianbhirawa.co.id/kasus>, (1 Juni 2011)

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 79

²² Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, xvii

Badan Lingkungan Hidup (BLH) : Lembaga yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam bidang lingkungan hidup, khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan

Fiqh Siyāsah : Merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

²⁵ Yakni lembaga pengawasan dalam ketatanegaraan Islam (*Wilāyah al-Hisbah*)

I. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang beralamatkan di jalan Patimura No. 223 Pasuruan, yang berada di daerah tingkat II Pasuruan Jawa Timur.

2. Data Yang Dikumpulkan

Data tentang tugas dan wewenang Badan Lingkungan Hidup (BLH) terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta tentang

²⁵ M. Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 4

sub bab sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, dan untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab satu membahas tentang gambaran umum yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori tentang pengertian, dasar hukum, sejarah dan perkembangan *wilāyah al-ḥisbah*. Serta tugas, kewenangan dan kedudukan *wilāyah al-ḥisbah* sebagai lembaga pengawasan dalam sistem tata negara Islam. Dan juga tentang Perundang-undangan Lingkungan hidup di Indonesia.

Bab tiga menjelaskan tentang laporan penelitian yang menjelaskan tentang obyek penelitian, yaitu tentang profil, tugas dan wewenang Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

Bab empat membahas tentang tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pendekatan analisis UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya pada bab terakhir yakni bab lima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

Abu Sa'id Al-Khudri.⁸

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri Rosululloh Saw bersabda : Siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia cegah dengan tangannya (kekuasaannya), jika ia tidak mampu (tidak mempunyai kekuasaan) maka cegahlah dengan lisan (ucapan atau tertulis), dan jika juga ia tidak mampu melakukannya, maka cegahlah dengan hati (berdoa)”.

a. Masa Nabi Muhammad SAW

⁸ Abu Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim Bisyarh Al-Nawawi, jilid 1, jus 1*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al- Alamiyah, 1995), 18

kami." Rasulullah setiap hari memantau pelaksanaan syari'at oleh masyarakat Madinah.⁹

Kondisi peradilan pada masa Nabi Muhammad Saw sudah terlihat dengan adanya sahabat yang diutus oleh Nabi Saw untuk menjadi *qāḍi*, seperti *Mu'adz Ibn Jabbal* sebagai *qāḍi* di Yaman, dan Umar Ibn al-Khattab di Madinah. Namun demikian, walaupun kewenangan untuk menyelesaikan persoalan diberikan kepada sahabat (*qāḍi*), Akan tetapi, apabila terjadi ketidakpuasan terhadap putusan tersebut, boleh mengajukan keputusan kembali kepada Nabi SAW. *Wilāyah al-Ḥisbah* pada masa ini sebagai suatu lembaga belum terbentuk sebagai suatu lembaga, hanya praktek-praktek yang mengarah pada kewenangan *ḥisbah* dilakukan sendiri oleh Nabi Saw.

b. Masa *Khulāfa' u Ar-Rāsyidīn*

Masa *Khulāfa' u Ar-Rāsyidīn* setelah Nabi Saw wafat, kewenangan sebagai pemimpin masyarakat (negara) digantikan oleh Abu Bakar, Umar Ibn al- Khathab, Utsman Ibn Affan, dan Ali Ibn Abi Thalib. Secara umum kondisi peradilan pada masa ini tidak banyak mengalami perubahan. Begitu juga dengan lembaga *ḥisbah* pada masa ini tidak mengalami perubahan, artinya *Muḥtasib* dipegang sendiri oleh Khalifah.

⁹ M. Nurul, "Historisitas Wilayah Al-Hisbah," dalam <http://id.shvoong.com/law-and-politics>, (18 Juni 2011)

Meskipun terdapat sejumlah laporan yang menyebutkan tentang penunjukan seorang pejabat pasar oleh Khalifah Umar ibn al-Khathab.¹⁰

c. Masa Daulah Umayyah

Setelah Ali Bin Abi Thalib wafat, kekhalifahan digantikan oleh Hasan Ibn Ali ibn Abi Thalib melihat kepada perdebatan dan kekurangannya dukungan masyarakat kepada kepemimpinannya, akhirnya ia serahkan kekhalifahan kepada Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan, maka di mulailah masa imperium Daulah *Umayyah* dari 661-750 M. Keberadaan peradilan pada masa ini memiliki keistimewaan terpisah dengan kekuasaan pemerintah dengan adanya penentuan *qādi* yang dipilih khalifah, dengan memiliki kewenangan memutus perkara kecuali dalam bidang *hudūd*. Pelaksanaan peradilan itu sendiri sesungguhnya masih sama dengan peradilan pada masa *Khulāfa'u Ar-Rāsyidīn*. *Wilāyah al-ḥisbah (muḥtasib)* pada masa ini tidak melembaga dan diangkat oleh khalifah.¹¹

d. Masa Daulah Abbāsiyah

Setelah Daulah *Umayyah* runtuh dan di gantikan oleh daulah *Abbāsiyah* dari kurun waktu 750 M–1225 M (123 H–656 H), umat Islam banyak mengalami kemajuan dalam segala bidang termasuk dalam

¹⁰ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar 2004), .xi

¹¹ M. Nurul, "Historisitas Wilayah Al-Hisbah," dalam <http://id.shvoong.com/law-and-politics>, (18 Juni 2011)

Yang pertama *Menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah*, Salah satunya ialah perintah untuk berjama'ah dan tidak menyendiri. Misalnya meninggalkan shalat Jum'at di tempat yang berpenghuni, menyuruh manusia mengerjakan shalat hari raya, mengingatkan orang yang menunda shalat hingga waktunya habis. Begitu juga dengan *ṭaharah* (bersuci), jika dikerjakan dengan cara yang bertentangan dengan pendapat *muḥtasib*, misalnya dalam menghilangkan najis dengan cairan atau wudhu dengan air yang telah berubah karena terkena sesuatu yang suci, atau mengusap hanya sebagian kepala, maka *muḥtasib* tidak berhak menyuruh mereka mengerjakan hal-hal tersebut seperti dirinya atau melarang mereka mengerjakan sesuai dengan pendapatnya.

Kedua adalah *Menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak manusia*, ada dua bagian umum dan khusus. Adapun yang bersifat umum contohnya seperti sebuah daerah yang tidak berfungsi lagi sumber airnya atau daerah tersebut di datangi musafir yang miskin kemudian penduduk daerah tersebut menolak memberikan bantuan, jika di *Baitul Mal* (kas negara) terdapat persediaan dana, maka *muhtasib* tidak diperbolehkan menyuruh sesuatu yang menimbulkan *muḍarat* kepada mereka karena semua hal tersebut menjadi tanggung jawab *Baitul Māl* (kas negara). Begitu juga jika masjid dan sekolah-sekolah mereka mengalami kerusakan. Kemudian yang bersifat khusus misalnya seperti penanganan hak-hak yang ditunda dan

Yang kedua mengenai *melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak Manusia*. Di antaranya yang harus dilarang oleh *muhtasib* contohnya adalah melarang seorang majikan bertindak *dālim* terhadap buruhnya dengan mengurangi gajinya atau menambah pekerjaannya padahal buruhnya sudah menunaikan kewajibannya dengan baik, tapi apabila keduanya bersengketa maka hakim lebih berhak menangani masalahnya.

Kemudian yang ketiga adalah *melarang kemungkaran yang terkait dengan hak-hak bersama antara Hak-hak Allah dan manusia*. Dalam hal ini *muhtasib* berhak melarang imam-imam masjid umum memanjangkan shalatnya hingga orang-orang yang lemah tidak kuat untuk melakukannya. Jika salah satu dari majikan membebani budaknya dengan pekerjaan-

¹⁷ Iin Solikhin, *Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam*, dalam jurnal *Ibda'* Vol. 3 No. 1 Jan-Jun 2005 33-44, P3M STAIN Purwokerto, 2

¹⁸ Al Mawardi, *al-ahkam al-sultaniyah*. 413

- a. *Muhtasib* memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki fasilitas yang memadai untuk menjalankan ibadah. Sarana prasarana masjid, penunjukan *mu'azzin* dan imam, menjadwalkan shalat lima waktu, shalat Jum'at dan shalat 'Aid, adalah sebagian dari tugasnya. Demikian pula ia akan menolak setiap pengabdian dan ketidaktaatan kepada kewajiban-kewajiban syari'ah lain yang dilakukan oleh perorangan maupun kolektif. Tugas-tugas *muhtasib* ini dapat diadopsi bahkan sampai saat ini, jika lembaga ini memang bisa dibentuk.
- b. *Muhtasib* memantau penegakan keadilan di masyarakat. Ia berusaha menegakkan *fair play* dalam berbagai sektor ekonomi guna meminimalisir eksploitasi yang mungkin terjadi di dunia ekonomi. Sebagai konsekuensinya, kita akan menemukan daftar petunjuk yang panjang tentang hal ini yang mengatur pengawasan timbangan dan takaran, kadar metal suatu koin, dan kualitas produk-produk makanan. Di samping itu harus memantau adanya manipulasi harga, pasokan dan produksi, kolusi monopolistis, penipuan kecurangan, dan setiap bentuk ketidak-adilan antar sektor. Secara garis besar ia harus mengintervensi setiap kali jalannya roda ekonomi dipermainkan oleh perorangan atau kelompok yang secara ekonomi kuat demi kepentingan pribadi mereka. Wilayah tugas

keseimbangan antara keduanya. Oleh karena itu pengelolaan, penggunaan maupun pemanfaatan sumber daya alam harus seimbang dengan keselarasan dan keserasian lingkungan hidup.²²

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan. Hal semacam itu merupakan beban sosial, karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung beban pemulihannya. Terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat merupakan kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.²³ Oleh karena itu, pembangunan (khususnya di bidang lingkungan) yang bijaksana harus dilandasi adanya wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai kesinambungan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

Sebagai realisasi dari pokok pikiran di atas, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam perkembangannya, ternyata kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa,

²² Mukhlis, Mustafa Lutfi. *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, (Malang ; Setara Press, 2010), 1

²³ Lihat *Pasal 67 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH*, (Bandung : Citra Umbara, 2009), 41

gubernur atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di mana Kewenangan Pemerintah daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :²⁶

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal

²⁶ Lihat Pasal 63 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH , 39

meningkat akan menimbulkan dampak yang semakin besar dan memerlukan pengendalian, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Tentang jabatan kepala BAPEDAL dan menteri Negara Lingkungan Hidup yang dipegang oleh satu orang, hal ini dimaksud untuk menghindari terjadinya benturan serta pertentangan antara pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan dan bagaimana upaya mengoordinasikannya.

Pada periode kabinet Gotong Royong (2001-2004) menteri negara Lingkungan Hidup melakukan upaya efisiensi dengan mengalihkan institusi BAPEDAL (Pusat) ke Kementerian Lingkungan Hidup. *Integrasi* kelembagaan antara BAPEDAL dan Menteri Negara Lingkungan Hidup terlaksana berdasarkan KEPRES Nomor 2 tahun 2002.

Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah yang dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.²⁹

²⁹ Lihat Pasal 10 (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Karena Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak masuk dalam urusan pemerintah, maka secara otomatis wewenang tersebut dilimpahkan kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH Yang dimaksud pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dewasa ini di dalam setiap pemerintah daerah nama lembaga yang menangani masalah lingkungan hidup berbeda-beda, ada yang masih bentuk BAPEDAL, dinas dan badan, tergantung kebutuhan daerah itu sendiri.³⁰

Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol dapat dibedakan menjadi kontrol internal dan kontrol eksternal. Kontrol internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural adalah masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah. Misalnya dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan itu melekat pada MENLH dan BAPEDAL (Badan pengendalian lingkungan hidup) bentuk kontrol seperti ini dapat di golongan sebagai jenis kontrol teknis administratif. Sedangkan kontrol eksternal dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ secara struktur organisasi yang berada di luar pemerintah

³⁰ Syahnur Indra, *Wawancara*, Pasuruan, 1 Juli 2011

dalam arti eksekutif. Misalnya kontrol yang dilakukan secara langsung seperti kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen terhadap lingkungan, maupun kontrol reaktif yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan, dalam hal ini peradilan umum maupun peradilan administrasi.³¹

³¹ Mukhlis, Mustafa Lutfi. *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, (Malang, Setara Press, 2010), 42

BAB III

KEWENANGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH)

KAB. PASURUAN TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

A. Sekilas Tentang Badan Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan

1. Latar Belakang Pembentukan Badan Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan

Lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.¹

Dengan adanya pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Pasuruan, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan menimbulkan permasalahan lingkungan serta ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan laju pembangunan. Permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi Kabupaten Pasuruan cukuplah kompleks mengingat wilayahnya cukup luas yaitu : 1.474 Km² (147.401,5 ha).

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka di Kabupaten Pasuruan urusan mengenai Lingkungan Hidup dibentuk Badan Lingkungan Hidup (BLH), di mana Badan Lingkungan Hidup (BLH) adalah unsur perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui

¹ Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), 4

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di mana pemerintah daerah dapat mendelegasikan kewenangan dalam menangani lingkungan hidup kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

2. Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) aparat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang perencanaan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan lingkungan untuk menegakkan UU nomor 32 tahun 2009 telah diikutsertakan beberapa pelatihan, pendidikan dan kursus teknis seperti : PPNS, AMDAL, serta audit lingkungan. Dalam menjalankan tugasnya Badan Lingkungan Hidup memiliki pegawai 6 orang lulusan S2, 21 orang S1, 4 orang Diploma, 29 orang lulusan SMA, 17 orang lulusan SMP, dan 3 orang lulusan SD. Di samping pegawai tetap yang sudah menduduki jabatan dan juga yang belum menduduki jabatan, masih ada tenaga yang statusnya masih kontrak sebanyak 3 orang yang berpendidikan sarjana, SMA 5 orang dan SMP 30 orang. Yang ditempatkan pada bidang-bidang dan sekretariat. .⁴

⁴ Iin Herlina, *Wawancara*, Pasuruan, 4 Juli 2011

- i. Erosi/abrasi pantai

B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan

Otonomi daerah telah memberikan perubahan yang mendasar bagi perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Khususnya pada pemerintahan daerah. Otonomi daerah telah meletakkan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dalam pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatakan bahwa kewenangan daerah mencakup dalam bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan dan moneter dan fiskal serta kewenangan lainnya. Berdasarkan pasal di atas maka pemerintah Kabupaten Pasuruan membentuk instansi untuk bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbentuk sebuah badan yaitu Badan Lingkungan Hidup (BLH). Yang kemudian tugas, fungsi serta kewenangannya ditetapkan dalam PERDA Nomor 13 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 63 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Ditegaskan, bahwa Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang lingkungan hidup.

- 5) Pengkoordinasian usulan program dan pelaporan hasil kegiatan masing-masing bidang.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan⁸

b. Bidang Analisa Dampak Lingkungan

Bidang analisa dampak lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang analisa dampak lingkungan. Bidang ini membawahi sub bidang bimbingan teknis dokumen lingkungan dan sub bidang pengkajian dan pengembangan kapasitas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang analisa dampak lingkungan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan konsep program kerja bidang analisa dampak lingkungan sebagai acuan pelaksanaan tugas.
- 2) Pembinaan teknis penyusunan penilaian dan rekomendasi AMDAL dan UKL & UPL
- 3) Pembinaan komisi penilaian AMDAL Kabupaten Pasuruan dan tim pengarah UKL & UPL
- 4) Pengkajian dalam pengelolaan, penurunan kualitas air, udara, tanah daerah rawan bencana.
- 5) Pengaturan dalam pencegahan, Monitoring, pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir laut.

⁸ *Ibid*

- 6) Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup, kondisi lahan tanah, rawan bencana
- 7) Pembinaan dan penerapan SNI, instrumen ekonomi produksi bersih, ecolabel dan sistem manajemen lingkungan dan teknologi berwawasan lingkungan.
- 8) Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim perlindungan lapisan 'ozon, pelaksanaan konvensi dan protokol serta perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup
- 9) Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan⁹

c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Bidang pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian. Bidang ini membawahi sub bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan sub bidang pengawasan pengelolaan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas :

- 1) Penyusunan konsep program kerja bidang pengawasan dan pengendalian sebagai acuan pelaksana tugas

⁹ *Ibid.*

- 2) Penetapan kebijakan peraturan di bidang pengelolaan limbah dan pencemaran lingkungan
- 3) Penetapan peraturan berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan propinsi
- 4) Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah dalam rangka memenuhi SPM
- 5) Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah
- 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan penataan izin pembuangan air limbah dan penyimpanan setara limbah B3 yang berdampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- 7) Pembinaan kepada instansi dan kelompok masyarakat terhadap penyelenggaraan PS air limbah
- 8) Pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan limbah yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan
- 9) Pemberian izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air
- 10) Pemberian izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah
- 11) Pemberian izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha kegiatan lainnya
- 12) Penegakan hukum lingkungan

- 14) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.¹⁰

d. Bidang Pemulihan dan Kebersihan

Bidang pemulihan dan kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pemulihan dan kebersihan. Bidang ini membawahi sub bidang pemantauan dan pemulihan SDA dan sub bidang kebersihan dan pertamanan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, bidang pemulihan dan kebersihan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan konsep program kerja bidang pemulihan dan kebersihan sebagai acuan pelaksanaan tugas
- 2) Penetapan kebijakan pelaksanaan kawasan sumber daya alam, sumber daya buatan, kawasan kelautan dan kedirgantaraan
- 3) Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim dan konservasi keanekaragaman hayati
- 4) Pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan keterlanjutan keanekaragaman hayati dan kriteria kerusakan lahan (pertanian, perkebunan dan hutan)
- 5) Pengawasan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan
- 6) Penanggulangan kerusakan akibat bencana

¹⁰ *Ibid.*

A. Analisis Terhadap Kewenangan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab. Pasuruan
Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009

Kemudian Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah menerangkan bahwa kewenangan daerah mencakup dalam bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan dan moneter dan fiskal serta kewenangan lainnya. Berdasarkan pasal tersebut berarti mengenai pengendalian dampak lingkungan murni dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan sendiri.

Dalam PERDA tersebut, dijelaskan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi antara lain :

- a. Pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- b. Pengawasan terhadap potensi sumber daya alam dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL.
- c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan.
- d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL.
- e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan.
- f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat.
- g. Pelaksanaan inventarisasi, sistematisasi, perencanaan dan pengendalian kebersihan dan pertamanan.

Keberadaan Badan Lingkungan Hidup (BLH) sangatlah penting dalam suatu daerah. Karena lembaga ini merupakan indikator yang paling penting dalam menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat untuk menghindarkan kerusakan lingkungan hidup yang dapat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

B. Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Kewenangan BLH Kab. Pasuruan

Dalam menyelenggarakan negara menurut Islam harus mengutamakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Segala sesuatu yang berkenaan dengan hukum publik (pidana) harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas ke Islaman, demikian juga dalam hukum privat (perdata), seperti halnya dalam masalah lingkungan hidup di mana kelestarian lingkungan hidup sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat luas.

Dalam membuat suatu undang-undang atau hukum pertimbangan *masalah* merupakan hal yang sangat penting dalam Islam sebagai suatu agama yang memiliki etis moral yang tinggi. Salah satu konsep terpenting dalam mengkaji Islam adalah menggunakan metode ijtihad salah satunya adalah *fiqh siyāsah*. Objek kajian *fiqh siyāsah* ini adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

Sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri, kajian *fiqh siyāsah* mempunyai metodologi dan pendekatan ilmiah sendiri. Metode yang dipakai dalam

kajiannya dapat kita jadikan penilaian apakah pemikiran-pemikiran dan praktek kenegaraan yang pernah berkembang dalam sepanjang sejarah Islam sudah sesuai dengan prinsip-prinsip umum ajaran Islam atau tidak. Di samping itu metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan suatu kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini. Sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang pada masa kini.

Metode kajian *fiqh siyāsah* tidak berbeda jauh dengan metode yang dipakai untuk kajian *fiqh* pada umumnya, yaitu metode *ushul fiqh* dan kaidah-kaidah *fiqh*. Metode *ushul fiqh* antara lain adalah *qiyās*, *istihsān*, *urf*, *‘adah*, *masalah Mursalah* dan *istishab*². Dengan metode ini, umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan zaman yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadis.

Kaidah-kaidah *fiqh* yang dapat digunakan untuk mempelajari dan mengembangkan *siyāsah* antara lain :

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَادَاتِ وَالنِّيَّاتِ

Perubahan hukum dengan sebab berubahnya zaman, tempat, situasi, adat dan niat.³

² Muhammad Iqbal *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), 15

³ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), 293

dapat kita pahami, BLH sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup juga harus bertindak tegas menghukum para pelaku perusakan lingkungan yang terbukti tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, karena akan berakibat sangat fatal bagi keselamatan masyarakat luas.

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan atau kebijaksanaan kepala negara terhadap rakyat tergantung kepada kemaslahatan.⁸

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab kalau aspirasi rakyatnya tersebut tidak diperhatikan, maka aturan tersebut tidak akan berlaku efektif. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyatnya. Karena itu kebijaksanaan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri. Sebagai contoh pemerintah tidak boleh mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan yang bukan bidangnya. Misalkan untuk jabatan kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) pemerintah mengangkat orang militer, apalagi hanya berdasarkan kedekatan hubungan (nepotisme). Di sini pemerintah harus mengutamakan prinsip-prinsip profesionalisme.⁹

⁸ Imam Musbikin, *Qawa'id Al Fiqhiyah*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2001), 124

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*.....h 16

Metode-metode tersebut perlu pula dilengkapi dengan ilmu bantu yaitu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan masyarakat . seperti sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik dan negara. Karena spesialisasi kajian fikih *siyāsah* ini di bidang muamalah (berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat yang cenderung berubah dan menghadapi berbagai masalah yang kompleks). Ini tentu saja memerlukan wawasan yang luas. Hal ini dapat diperoleh dengan memanfaatkan teori dan konsep ilmu-ilmu tersebut buat menambah wawasan dalam memahami obyek bahasan ilmu ini, dan pengembangannya

Dari uraian tersebut nampak bahwa spesialisasi kajian *fiqh siyāsah* adalah berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, berbangsa dan

bernegara. Menurut kajian ini seorang kepala negara harus mampu mengayomi dan melindungi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pemerintah harus membentuk lembaga-lembaga atau departemen-departemen yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.

Salah satu lembaga negara yang pernah ada dalam negara Islam adalah lembaga *hisbah*. Menurut Al-Mawardi *hisbah* merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang untuk memerintahkan perkara yang baik, ketika yang baik itu sudah mulai ditinggalkan orang dan melarang sesuatu yang mungkar ketika yang mungkar sudah mulai dikerjakan orang.¹⁰

Allah Berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 104

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imran : 104)¹¹

Pejabat yang bertanggung jawab atas lembaga *hisbah* ini disebut *muhtasib*. Tugas dan kewenangan *Muhtasib* dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori ;¹²

1. Yang terkait dengan Allah, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki fasilitas yang memadai

¹⁰ Al-mawardi, *al-Ahkam*... 240

¹¹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 79

¹² Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, xvii

untuk menjalankan ibadah. Sarana prasarana masjid, penunjukan muazzin dan imam, menjadwalkan shalat lima waktu, shalat Jum'at dan shalat Ied.

2. Yang terkait dengan hak sesama (muamalah), memantau penegakan keadilan di masyarakat. Seperti pengawasan timbangan, takaran, kadar metal suatu koin, dan kualitas produk-produk makanan. Di samping itu harus memantau adanya manipulasi harga, pasokan dan produksi, kolusi monopolistis, penipuan kecurangan, dan setiap bentuk ketidak-adilan antar sektor.
3. Yang terkait dengan hak Allah dan manusia, memberikan perhatian yang khusus terhadap berbagai layanan umum khususnya kondisi kesehatan kota. Ia harus memantau seluruh pengelolaan Seperti penerangan jalan, pengelolaan sampah, desain arsitektur bangunan-bangunan kota, suplai air, dan sanksi-sanksi anti polusi dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwa tugas dan kewenangan badan lingkungan hidup (BLH) sudah sesuai dengan perspektif *hisbah* dalam Islam, akan tetapi ruang lingkup pembahasan *hisbah* lebih luas dari pada Badan Lingkungan Hidup (BLH), yang hanya mempunyai kewenangan di bidang lingkungan hidup. Sedangkan *hisbah* menyangkut seluruh aspek kehidupan yang terkait dengan *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar*, yang termasuk di dalamnya tentang pengawasan lingkungan hidup yaitu memantau seluruh pengelolaan Seperti pengelolaan sampah, dan sangsi anti polusi.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan di analisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

- 72

- Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Jakarta, Djambatan, 1994
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Sahirul Alim, *Menguak Keterpaduan Sains, Teknologi Dalam Islam*, Yogyakarta, Dinamika, 1996
- Siti Sundari Rungkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Surabaya, Airlangga University Press, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kulitatif Dan R&D* Badung, Alfabeta, 2008
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia, Sebuah Pengantar*, Cet. 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya, Dana Karya, 2004
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bandung, Citra Umbara, 2009
- Ahmad Imamudin, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Korporasi Dan Sanksinya Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Skripsi, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2007
- <http://kominfo.jatimprov.go.id/potwatch.php?id=672>
- <http://penegakanhukum.menlh.go.id>
- <http://www.harianbhirawa.co.id/kasus/28591>

Iin Solikhin, *Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam*, dalam jurnal *Ibda'* Vol. 3 No. 1 Jan-Jun 2005 33-44, P3M STAIN Purwokerto,

M. Nurul, "Historisitas Wilayah Al-Hisbah ,"dalam <http://id.shvoong.com/law-and-politics>

Makalah pencemaran lingkungan hidup Bidang industri, dalam <http://www.scribd.com/doc>

Syahnur Indra, *Wawancara*, Pasuruan , 1 Juli 2011

Iin Herlina, *Wawancara*, Pasuruan, 4 Juli 2011